

**PENULISAN HUKUM**

**(Skripsi)**

**PERANAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM  
PROSES PERANCANGAN PERATURAN DAERAH (PERDA)  
DI KABUPATEN WONOGIRI**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat  
Guna Melengkapi Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Sebelas Maret  
Surakarta**

**Oleh :**

**ERMA YULI HABSARI**

**NIM : E 0098009**

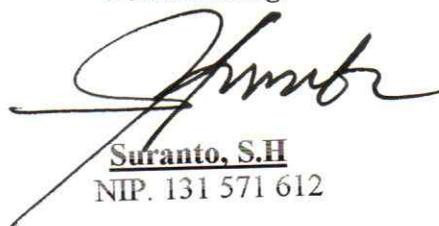
**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2002**

Disetujui untuk dipertahankan  
Dosen Pembimbing



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suranto', is written over the printed name and NIP.

Suranto, S.H  
NIP. 131 571 612

### PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan disahkan oleh  
Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

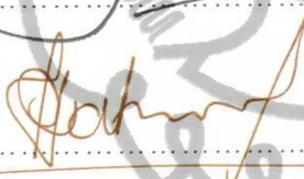
Pada :

Hari : PABU

Tanggal : 6 FEBRUARI 2002

Tim Penguji

1.  ..... ( SUNARNO DANUSASTRO, SH )  
Ketua

2.  ..... ( SUGENG PRAPTONO, SH )  
Sekretaris

3.  ..... ( SURANTO, SH )  
Anggota

Mengetahui

Dekan

  
Suparno Danusastro, S.H.  
NIP : 130 516 359

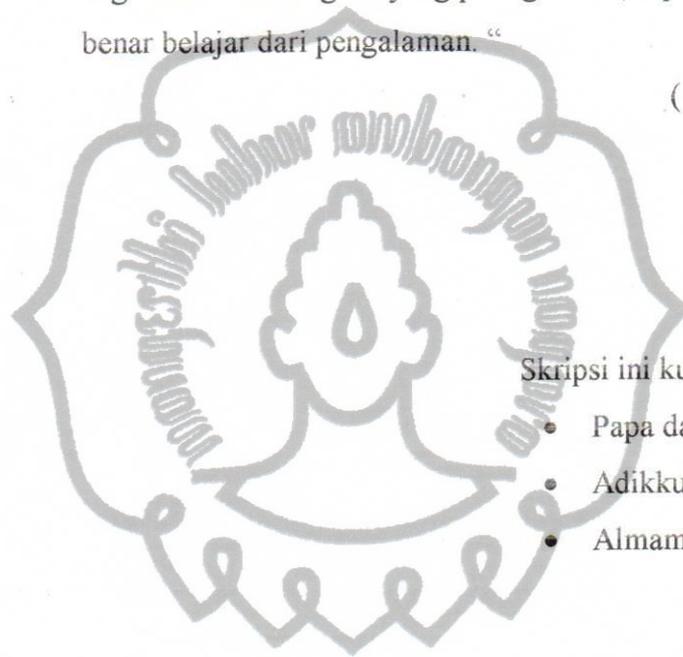
**MOTTO :**

“ Bila kebijaksanaan yang kau cari, lima hal kau harus hati-hati.  
Kepada siapa kau bicara, tentang apa kau bicara, dan... bagaimana,  
Serta dimana.....”

( Elisabeth L. Ingalls )

“ Pengalaman adalah guru yang paling brutal, tapi kita belajar, benar-  
benar belajar dari pengalaman. “

( C. S Lewis )



Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Papa dan Mama tercinta
- Adikku Aan dan Nia
- Almamater

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang Tunggal, penguasa alam semesta dimana segala makhluk tunduk dan mengabdikan, sumber dari segala kebenaran dan dari-Nyalah segala kasih sayang bersumber serta akhir dimana semua akan kembali. Hanya atas kemudahan dan petunjuk-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul PERANAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PROSES PERANCANGAN PERATURAN DAERAH ( PERDA ) DI KABUPATEN WONOGIRI.

Penyusunan penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum ini merupakan buah pemikiran penulis sebagai akumulasi pengetahuan yang diserap selama menempuh proses pembelajaran.

Dalam penyusunan Penulisan Hukum ini, penulis memperoleh dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil, sehingga pada kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Haris Mudjiman, MA, Ph.D, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Bapak Sunarno Danusastro, S.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Bapak Suranto, S.H, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta selaku Pembimbing Penulisan Hukum ini yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis;
4. Ibu Rofikah, S.H, selaku Pembimbing Akademik;
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

6. Bapak Sutanto Djosowiyatmo, S.H, selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri;
7. Bapak Eko Subagyo, S.H, yang secara sukarela telah membantu penulis dalam pengumpulan data;
8. Papa, Ibu, adik-adikku tersayang Aan dan Nia atas doa dan kebersamaannya serta kasih sayang yang tercipta selama ini;
9. Bapak dan Ibu Djoko Wiryanto yang telah memberikan dorongan dan bimbingannya, yang telah meminjamkan komputer di rumahnya untuk proses pengetikan;
10. Sahabat-sahabat setiaku : Nita, Rani, Mas Anto, Dewi;
11. Teman-teman Fakultas Hukum : Susie, Prima, Sita, Wiwin, Erni, Dinar, Dahlia, Desi, Indra, Kuncoro, Bobby;
12. Teman-teman di rumah : Windari, Rita, Bina, Mas Indra, Mas Nanang;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu lancarnya penulisan ini;

Sebagai sebuah karya manusia, Penulisan Hukum ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan baik di dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan kearah yang lebih baik.

Akhirnya penulis mengharapkan Penulisan Hukum ini dapat menyumbangkan sesuatu yang berguna dan memperkaya pengetahuan bagi kita semua dalam proses belajar yang takkan pernah selesai.

Surakarta,

2002.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAKSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori.....	11
a) Pengertian Pemerintah Daerah.....	11
1. Dasar Hukum.....	
2. Asas -asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	13
3. Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..	15
b) Otonomi Daerah.....	17
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	17
2. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah.....	19
3. Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggungjawab	21
c) Organisasi Pemerintah Daerah.....	23
d) Tinjauan tentang Peraturan Daerah.....	26
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	26
2. Landasan Umum Peraturan Daerah.....	27
3. Dasar Hukum Peraturan Daerah.....	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.....	33
B. Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Proses Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri	36
C. Hasil Penelitian.....	42
C. Hambatan-hambatan dalam perancangan Peraturan Daerah Dan cara untuk mengatasinya.....	44
BAB IV PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



## ABSTRAK

**Erma Yuli Habsari, E. 0098009, PERANAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PROSES PERANCANGAN PERATURAN DAERAH ( PERDA ) DI KABUPATEN WONOGIRI, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum ( Skripsi ), 2002.**

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah semakin lama semakin berkembang dan meningkat, seiring dengan perkembangan zaman. Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka diperlukan suatu peraturan perundang – undangan yang dapat menghasilkan produk hukum daerah yang mempunyai kualitas, mutu dan tidak cepat lapuk dimakan waktu. Pemerintahan yang baik haruslah memiliki suatu pedoman ataupun pegangan didalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itulah perlu adanya produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah yang dapat digunakan sebagai tolak ukur berhasil tidaknya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Hal ini dapat diketahui dari proses perancangan produk – produk hukum daerah sampai dengan diberlakukannya dalam masyarakat. Bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri yang ikut serta atau berperan aktif didalam proses perancangan Peraturan Daerah adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Bagian Hukum Sekretariat Daerah ini merupakan bagian yang sangat berperan dan vital bagi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan fungsi otonomi daerah khususnya dalam perancangan Peraturan Daerah.

Untuk menunjang penelitian tersebut, maka penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Studi Lapangan meliputi wawancara dan observasi. Mengenai teknik analisa data, penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan model **Interactive Model Of Analysis** yang terdiri dari tiga tahap/ komponen, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dalam menjalankan peranannya tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri mengadakan hubungan ataupun koordinasi dengan Dinas / Lembaga Daerah dan atau Unit Kerja untuk membicarakan mengenai perancangan Peraturan Daerah. Koordinasi yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah tersebut dilakukan dengan jalan mengundang Dinas / Lembaga Daerah dan atau Unit Kerja untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah. Hubungan kerja ini dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung yang bersifat hubungan fungsional yang meliputi kegiatan administrasi dan juga dilakukan dalam bentuk operasional.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri memegang peranan yang sangat penting dan vital dalam proses perancangan Peraturan

Daerah, khususnya Peraturan Daerah di Kabupaten Wonogiri. Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dapat dilihat mulai dari persiapan dan pengundangan Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menemui beberapa hambatan, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya personel atau staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah khususnya untuk personel perundang – undangan, sehingga menghambat dalam melakukan aktivitas kerja merancang produk – produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia di Unit Kerja atau Dinas yang kurang profesional dan kurang memadai.
3. Kurangnya sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
4. Hambatan dana / Anggaran.
5. Hambatan yang datang dari Dewan, yaitu tingkat pendidikan yang kurang memadai untuk duduk sebagai anggota Dewan.

Upaya mengatasi hambatan – hambatan tersebut, antara lain dengan upaya:

1. Penambahan jumlah staf atau personel pada Bagian Hukum khususnya untuk personel perundang – undangan.
2. Peningkatan kapabilitas dan kepastian kerja sumber daya manusia agar memiliki keahlian dan ketrampilan yang memadai dengan mengikuti pendidikan latihan / bimbingan teknis mengenai teknik perancangan suatu perundang – undangan .
3. Di upayakan adanya peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Telah diupayakan penambahan dan dan anggaran.
5. Peningkatan taraf pendidikan untuk duduk menjadi anggota Dewan.